

KINERJA FASILITASI KESEKRETARIATAN DPRD DALAM MENDUKUNG
TUGAS DAN FUNGSI DPRD PROVINSI KALIMANTAN SELATANMirabella Febrianti¹, Muhammad Riduansyah Syafari²Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia
bellamira522@gmail.com¹

Informasi Artikel	Abstract
Vol: 2 No : 10 Oktober 2025 Halaman : 45-53 Keywords: <i>performance, DPRD secretariat, facilitation division, DPRD functions</i>	This study aims to analyze the performance of the Facilitation Division in supporting the implementation of the DPRD's duties and functions and to identify factors that hinder its performance. The research uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques through observation, in-depth interviews, and documentation studies. Informants consist of DPRD leaders, heads of divisions, sub-divisions, employees, and contract workers within the South Kalimantan Provincial DPRD Secretariat. The results of the study show that the performance of the Facilitation Division is not yet optimal. Inefficiencies were found in the implementation of tasks, suboptimal work achievements, and low responsiveness to the work needs of council members. The main inhibiting factors include the absence of standard operating procedures (SOPs), limited human resources and budget, weak coordination between sub-sections, and the lack of a work culture that supports productivity. Conclusion As a new part of the reorganization, the Facilitation Division still faces structural and functional adaptation challenges. Strengthening internal management, developing clear SOPs, and increasing employee capacity are needed to promote effectiveness and professionalism in supporting the DPRD's functions.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Bagian Fasilitasi dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat kinerjanya. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Informan terdiri atas pimpinan DPRD, kepala bagian, subbagian, pegawai, dan tenaga kontrak di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Bagian Fasilitasi belum optimal. Ditemukan ketidakefisienan dalam pelaksanaan tugas, pencapaian kerja yang belum maksimal, serta rendahnya responsivitas terhadap kebutuhan kerja anggota dewan. Faktor penghambat utama meliputi belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, lemahnya koordinasi antarsubbagian, serta belum terbentuknya budaya kerja yang mendukung produktivitas. Kesimpulan Sebagai bagian baru hasil reorganisasi, Bagian Fasilitasi masih menghadapi tantangan adaptasi struktural dan fungsional. Diperlukan penguatan manajemen internal, penyusunan SOP yang jelas, serta peningkatan kapasitas pegawai untuk mendorong efektivitas dan profesionalisme kinerja dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD.

Kata Kunci: kinerja, kesekretariatan dewan, bagian fasilitasi, fungsi DPRD**PENDAHULUAN**

Perubahan sistem ketatanegaraan di Indonesia setelah reformasi membawa konsekuensi penting terhadap struktur pemerintahan, termasuk penguatan posisi dan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menjalankan fungsi legislatif, anggaran, dan pengawasan (Wuryandanu, 2024). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa DPRD memiliki kedudukan yang setara dengan kepala daerah, yang secara normatif memerlukan dukungan kelembagaan yang kuat dan profesional (Leylana & Sarjito, 2024). Dalam hal ini, Sekretariat DPRD memegang peranan penting sebagai penyedia layanan administratif dan teknis untuk mendukung kinerja DPRD, khususnya melalui Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.

Mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap lembaga pemerintah, termasuk Sekretariat DPRD, diwajibkan menerapkan sistem manajemen kinerja yang efektif (Andriani dkk., 2025). Menyatakan bahwa kinerja organisasi erat kaitannya dengan pencapaian hasil kerja individu maupun kelompok sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki. Oleh karena itu, kemampuan sumber daya manusia dalam menjalankan tugas serta struktur kelembagaan yang mendukung menjadi elemen penting dalam pencapaian tujuan organisasi publik.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Muhammad, 2022) menunjukkan bahwa meskipun Sekretaris DPRD memiliki peran penting dan cenderung menerapkan gaya kepemimpinan yang berorientasi pada pegawai, masih terdapat hambatan signifikan seperti rendahnya motivasi pegawai dan keterbatasan anggaran dalam pengembangan kompetensi. Temuan ini memperkuat asumsi bahwa faktor internal seperti manajemen sumber daya dan dukungan struktural berpengaruh besar terhadap kualitas pelayanan Sekretariat DPRD.

Sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada peran Sekretaris DPRD secara umum, belum banyak yang secara khusus menyoroti kinerja Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan sebagai bagian baru dalam struktur Sekretariat DPRD. Bagian ini memiliki peran strategis dalam menjamin efektivitas pelaksanaan fungsi utama DPRD. Minimnya kajian empiris yang membahas performa bagian ini, terutama dalam konteks DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (research gap) yang perlu diisi.

Bagian Fasilitasi di Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan saat ini menghadapi berbagai kendala struktural dan operasional, termasuk jumlah pegawai yang terbatas, pembagian tugas yang belum optimal, serta anggaran yang tidak proporsional dengan beban kerja (Hidayati & Harini, 2024). Masalah-masalah ini menyebabkan kinerja bagian tersebut belum maksimal dalam mendukung tugas DPRD, seperti perumusan kebijakan, pengawasan program pembangunan, hingga penyusunan dan evaluasi anggaran (Ramadhan, 2024). Hal ini menunjukkan urgensi untuk dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja bagian tersebut, agar peran strategisnya dapat dioptimalkan.

Kinerja Bagian Fasilitasi dalam lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan memiliki peran strategis dalam memastikan kelancaran pelaksanaan fungsi utama DPRD, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan (Subejo, 2024). Ditemukan bahwa kinerja bagian ini masih belum mencapai tingkat optimal sebagaimana yang diharapkan. Hal ini tercermin dari berbagai indikator seperti ketidakefisienan dalam pelaksanaan proses kerja, belum maksimalnya pencapaian target fasilitasi, serta rendahnya responsivitas terhadap dinamika kegiatan legislatif daerah. Padahal, posisi strategis Bagian Fasilitasi berperan penting dalam mendukung fungsi utama DPRD, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan, yang menuntut koordinasi dan dukungan administratif yang efektif dan profesional.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi manajerial dan operasional pada Bagian Fasilitasi belum berjalan secara terpadu. Beberapa faktor penghambat yang teridentifikasi antara lain keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi jumlah maupun kompetensi, belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku dan terdokumentasi, lemahnya komunikasi serta koordinasi baik internal maupun eksternal, dan keterbatasan anggaran yang tidak seimbang dengan beban tugas yang diemban. Selain itu, budaya kerja yang belum sepenuhnya berorientasi pada hasil (performance-based) turut memperlemah efektivitas pelaksanaan tugas.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan Sekretariat DPRD, khususnya pada Bagian Fasilitasi, agar mampu menjalankan fungsi pelayanan dan dukungan terhadap DPRD secara profesional, efisien, dan akuntabel. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan empiris bagi upaya reformasi birokrasi dan perbaikan sistem kerja di lingkungan kesekretariatan dewan, serta menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan yang adaptif dan berorientasi pada kinerja. Dengan demikian, hasil penelitian ini memiliki relevansi strategis dalam mendukung peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan.

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan penelitian yang telah diidentifikasi, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Kesekretariatan Dewan Bagian Fasilitasi dalam menunjang tugas dan fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang

memengaruhi kinerjanya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam kajian administrasi publik serta menjadi rujukan praktis bagi penguatan kelembagaan DPRD di tingkat daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai kinerja Kesekretariatan Dewan, khususnya Bagian Fasilitasi, dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara holistik dan kontekstual melalui data deskriptif dari sumber-sumber primer (Gustaman dkk., 2024).

Penelitian dilaksanakan selama bulan Juni hingga Juli 2025, bertempat di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Subjek penelitian adalah aparatur sipil negara yang bekerja di Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, serta pihak-pihak terkait lainnya yang dapat memberikan informasi relevan, seperti pejabat struktural, staf pelaksana, dan anggota DPRD.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview), observasi langsung, dan dokumentasi (Adriaman, 2024). Wawancara dilakukan terhadap informan kunci yang dipilih secara purposive sampling, yaitu mereka yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terhadap aktivitas Bagian Fasilitasi. Observasi dilakukan untuk melihat langsung pelaksanaan tugas dan fungsi bagian tersebut, sedangkan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder seperti struktur organisasi, laporan kegiatan, dan regulasi pendukung.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif model Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Validitas data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan metode untuk memastikan keakuratan serta kredibilitas informasi yang diperoleh (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Kesekretariatan Dewan

Kesekretariatan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya dalam bagian fasilitasi, dengan mengaitkan antara data dan temuan empiris di lapangan dengan landasan teori. Pembahasan ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana bagian fasilitasi Kesekretariatan DPRD telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga legislatif daerah yang memiliki kedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama kepala daerah (Kelana dkk., 2024). DPRD berfungsi sebagai representasi rakyat dalam pemerintahan provinsi, yang menjalankan peran legislasi (membentuk peraturan daerah), anggaran (menetapkan APBD bersama gubernur), serta pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan kebijakan pemerintah daerah (Putri & Endeng, 2025).

Dalam menjalankan fungsinya, DPRD tidak dapat bekerja sendiri. Untuk menunjang tugas dan kewenangan lembaga legislatif ini, dibentuklah Kesekretariatan DPRD sebagai unit administratif yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif, termasuk dalam hal fasilitasi kegiatan DPRD (Anyang & Fathurrahman, 2024). Fasilitasi ini mencakup penyediaan sarana dan prasarana, pelayanan informasi, dukungan rapat-rapat alat kelengkapan dewan, hingga penyusunan naskah-naskah administrasi dewan.

Pembahasan ini akan menguraikan bagaimana fungsi fasilitasi oleh Kesekretariatan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan telah dilaksanakan berdasarkan fakta di lapangan dan sejauh mana pelaksanaannya telah memenuhi indikator-indikator teoritis mengenai kinerja birokrasi publik, seperti efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan akuntabilitas. Selain itu, juga akan dianalisis berbagai faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan tugas fasilitasi tersebut.

Secara organisatoris kinerja sekretariat DPRD Bagian Fasilitasi Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat dari tabel realisasi kinerja yang dilaporkan ke kementerian PAN RB sebagaimana tabel berikut :

Table 1. Realisasi Kinerja Bagian Fasilitasi

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya Layanan Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Meningkatnya Layanan Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	96	83.68	87.17
2	Meningkatnya Administrasi Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Persentase Administrasi Fasilitasi Penganggaran	100	100	100
		Persentase Administrasi Fasilitasi Pengawasan	100	100	100
		Persentase Administrasi Fasilitasi Kerjasama dan Aspirasi	100	100	100

Sumber : Lakip Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, 2024

Dalam hal ini, penentuan ambang kinerja organisasi yang dibutuhkan tentunya dapat dijadikan dasar proses seleksi, perencanaan, evaluasi kinerja organisasi dan pengembangan sumber daya manusia organisasi. Mengacu pada pengertian kinerja organisasi yang terdiri atas Efisiensi, Kepentingan Publik, Responsifitas, Fungsi-fungsi Khusus, dan Kepentingan Privat menurut Lane Indikator tersebut sebagai bahan analisis untuk melihat Kinerja Organisasi.

Efisiensi

Ditinjau melalui perspektif efisiensi menurut Lane, yang menekankan pada pemanfaatan sumber daya secara optimal untuk menghasilkan output maksimal, maka kinerja Bagian Fasilitasi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam pembahasan kebijakan anggaran belum mencerminkan prinsip efisiensi yang ideal. Dari sisi input, ditemukan berbagai hambatan seperti terbatasnya jumlah sumber daya manusia, belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku, alokasi anggaran yang belum proporsional, dan lemahnya tata kelola organisasi. Ketiadaan sistem kerja yang terstruktur dan jelas menyebabkan tugas pokok dan fungsi menjadi tumpang tindih, serta membuat proses kerja berjalan tidak efektif. Di sisi lain, output yang dihasilkan juga belum optimal, ditandai dengan lambannya fasilitasi agenda pembahasan anggaran, kurangnya ketepatan waktu, rendahnya kualitas pelayanan administratif terhadap anggota DPRD, serta minimnya inovasi dalam mendukung proses legislasi anggaran.

Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi ketidakseimbangan antara input yang digunakan dengan output yang dicapai, sehingga menciptakan bentuk inefisiensi baik dari aspek struktural, fungsional maupun manajerial. Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian dan kerangka teori Lane, dapat disimpulkan bahwa efisiensi dalam pelaksanaan fasilitasi pembahasan kebijakan anggaran belum tercapai secara optimal (Rohmah dkk., 2025a). Hal ini menjadi bukti bahwa masih dibutuhkan perbaikan mendasar dalam pengelolaan sumber daya, penguatan sistem kerja, dan peningkatan

kapasitas kelembagaan agar efisiensi sebagai indikator kinerja institusional dapat benar-benar terwujud.

Berdasarkan hasil penelitian dan kerangka teori efisiensi yang dikemukakan Lane, dapat disimpulkan bahwa efisiensi dalam pelaksanaan fasilitasi pembahasan kebijakan anggaran di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan belum tercapai secara optimal. Situasi ini menegaskan urgensi dilakukannya penelitian lebih mendalam untuk mengidentifikasi akar permasalahan dan menemukan strategi yang tepat dalam memperbaiki sistem kerja, memperkuat manajemen kelembagaan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong terciptanya tata kelola kesekretariatan yang efisien, responsif, dan berorientasi pada kinerja, guna menunjang pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD secara lebih profesional.

Kepentingan Publik

Berdasarkan teori, yang menitikberatkan pada orientasi kebijakan dan tindakan administrasi publik untuk melayani kebutuhan masyarakat secara luas, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan oleh Bagian Fasilitasi belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan prinsip tersebut. Dari sisi input, keterbatasan jumlah personel pengawasan, lemahnya pelatihan teknis, kurangnya koordinasi antara subbagian, serta minimnya dukungan anggaran mengakibatkan pelaksanaan pengawasan oleh DPRD menjadi tidak maksimal.

Ketiadaan instrumen kerja yang baku dan tidak terintegrasinya sistem informasi pengawasan juga menjadi kendala struktural yang berdampak pada kualitas layanan yang diberikan. Sementara itu, dari sisi output, fungsi fasilitasi terhadap tugas pengawasan belum mampu menjangkau isu-isu strategis pemerintahan secara menyeluruh, sehingga aspirasi publik yang seharusnya diadvokasi melalui fungsi pengawasan tidak tertampung secara maksimal (Suprpti Widasih, 2025). Banyak temuan dalam pelaksanaan pengawasan belum ditindaklanjuti secara sistematis, dan hasil evaluasi DPRD atas kinerja perangkat daerah belum difasilitasi dengan baik oleh sekretariat.

Hal ini mengindikasikan bahwa fasilitasi pengawasan belum sepenuhnya diarahkan untuk memenuhi kepentingan publik secara substantif, karena masih bersifat administratif dan terbatas pada rutinitas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Bagian Fasilitasi belum optimal dalam menerapkan prinsip kepentingan publik sebagaimana dikemukakan oleh Lane, karena belum mampu menjembatani kebutuhan masyarakat dengan pengawasan DPRD secara efektif. Dibutuhkan penguatan sistem kerja, SDM, dan integrasi data agar pengawasan tidak sekadar formalitas, tetapi menjadi instrumen kontrol yang benar-benar menjawab harapan masyarakat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peran Bagian Fasilitasi dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD masih bersifat administratif dan belum berorientasi pada hasil (outcome-based). Padahal, dalam perspektif administrasi publik modern, fungsi fasilitasi tidak hanya terbatas pada penyediaan dukungan teknis dan administratif, tetapi juga mencakup kemampuan mengintegrasikan informasi, menganalisis kebijakan, serta mendorong tindak lanjut hasil pengawasan agar berdampak nyata bagi kepentingan publik (Hildawati dkk., 2024). Ketidakefektifan ini menandakan masih adanya kesenjangan antara kebijakan kelembagaan dengan implementasi di lapangan.

Selain itu, lemahnya sistem koordinasi lintas bagian dan tidak adanya mekanisme evaluasi kinerja secara berkala memperburuk efektivitas pelaksanaan pengawasan. Bagian Fasilitasi seharusnya menjadi simpul koordinasi antara DPRD dengan perangkat daerah, sehingga hasil pengawasan dapat ditindaklanjuti dalam bentuk rekomendasi kebijakan atau perbaikan program kerja pemerintah daerah. Namun, dalam praktiknya, proses fasilitasi cenderung berjalan secara parsial dan belum diimbangi dengan dukungan data serta analisis yang komprehensif.

Dengan demikian, penguatan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme aparatur menjadi kebutuhan mendesak agar fungsi fasilitasi dapat berjalan sesuai dengan prinsip kepentingan publik

yang dikemukakan oleh Lane. Pengembangan sistem informasi pengawasan berbasis data, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis dan substantif, serta pembentukan SOP yang jelas dan terukur menjadi langkah strategis dalam mendorong efektivitas fasilitasi pengawasan. Apabila langkah-langkah ini dapat diimplementasikan secara konsisten, maka Bagian Fasilitasi tidak hanya berperan sebagai pendukung administratif, tetapi juga sebagai mitra strategis DPRD dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Responsivitas

Menurut teori responsivitas dari Lane (Winduro, 2025), kinerja birokrasi publik dinilai dari kemampuannya dalam merespons secara cepat, tepat, dan relevan terhadap kebutuhan, tuntutan, serta aspirasi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, kinerja Bagian Fasilitasi dalam mendukung penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat belum sepenuhnya mencerminkan prinsip responsivitas tersebut. Dari sisi input, ditemukan bahwa keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pelatihan komunikasi publik, serta belum tersedianya sistem informasi aspirasi yang modern dan terintegrasi menjadi faktor penghambat utama.

Kegiatan reses dan penjangkaran aspirasi belum difasilitasi dengan perangkat kerja yang optimal, termasuk format pelaporan yang belum seragam dan minimnya dukungan logistik untuk penyebarluasan informasi. Sementara dari sisi output, pelaksanaan fasilitasi aspirasi masyarakat masih bersifat prosedural dan belum sepenuhnya responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Banyak aspirasi yang telah dihimpun tidak diolah secara sistematis menjadi bahan pertimbangan kebijakan DPRD, dan tidak ada umpan balik yang jelas kepada masyarakat mengenai tindak lanjut aspirasi tersebut.

Kondisi ini menunjukkan rendahnya kepekaan sistem terhadap kebutuhan warga, serta lemahnya jembatan antara aspirasi publik dan pengambilan kebijakan. Dengan demikian, berdasarkan analisis teori responsivitas Lane, dapat disimpulkan bahwa respons kinerja Bagian Fasilitasi terhadap penyerapan aspirasi masyarakat masih rendah, karena keterbatasan sistem, SDM, dan pola kerja yang belum adaptif terhadap harapan masyarakat. Untuk mencapai responsivitas yang ideal, perlu dibangun sistem aspirasi digital, peningkatan kapasitas pegawai, serta mekanisme umpan balik yang transparan kepada publik.

Fungsi-Fungsi Khusus

Dalam perspektif fungsi-fungsi khusus menurut Lane (Rohmah dkk., 2025b), birokrasi publik tidak hanya menjalankan fungsi administratif umum, tetapi juga fungsi-fungsi yang bersifat khusus dan krusial, seperti menjamin integritas lembaga dan menjaga standar etika dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fasilitasi terhadap kode etik DPRD oleh Bagian Fasilitasi Sekretariat masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitas fungsi khusus tersebut. Dari sisi input, keterbatasan pemahaman pegawai terhadap substansi kode etik, belum adanya program pelatihan internal yang berkelanjutan, serta minimnya koordinasi antara Bagian

Fasilitasi dan Badan Kehormatan DPRD, menjadi hambatan struktural yang signifikan. Selain itu, tidak adanya standar pelaporan pelanggaran etik dan ketiadaan perangkat pendukung seperti sistem dokumentasi elektronik, menyebabkan fungsi pengawasan etika belum dapat dijalankan secara sistematis dan profesional. Dari sisi output, kegiatan fasilitasi yang dilakukan masih terbatas pada dokumentasi rapat dan distribusi naskah aturan etik, tanpa disertai langkah proaktif dalam menegakkan atau menginternalisasi nilai-nilai etika bagi anggota dewan. Pelanggaran etik yang muncul sering kali tidak segera difasilitasi dalam bentuk rekomendasi atau pembinaan, sehingga menurunkan efektivitas lembaga dalam menjaga integritas institusional (Kewo, 2024).

Dengan demikian, berdasarkan teori Lane, dapat disimpulkan bahwa fungsi-fungsi khusus seperti pelaksanaan dan pengawasan kode etik belum difasilitasi secara optimal oleh Bagian Fasilitasi. Kesenjangan antara input yang tersedia dan keluaran yang dihasilkan mencerminkan lemahnya peran fasilitasi dalam menjamin tegaknya nilai-nilai etik legislatif. Untuk itu, diperlukan penguatan sistem

pelaporan etik, peningkatan kapasitas SDM, dan sinergi yang lebih kuat dengan Badan Kehormatan agar fungsi khusus ini dapat dijalankan secara profesional dan berdaya guna.

Kepentingan Privat

Dalam kerangka teori kepentingan privat, birokrasi publik tidak dapat dilepaskan dari dinamika individu atau kelompok yang memiliki preferensi, kebutuhan, dan tujuan pribadi, yang apabila tidak dikelola dengan baik dapat memengaruhi orientasi pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Bagian Fasilitasi dalam mendukung peningkatan kapasitas DPRD masih belum berjalan secara maksimal, baik dari sisi input maupun output, yang menunjukkan potensi pergeseran dari kepentingan institusional ke kepentingan privat.

Dari sisi input, terbatasnya alokasi anggaran untuk pelatihan, minimnya kegiatan pengembangan kapasitas yang bersifat berkelanjutan, serta lemahnya evaluasi kebutuhan kompetensi anggota dewan menyebabkan program peningkatan kapasitas lebih sering bersifat simbolik daripada strategis. Selain itu, pemilihan materi dan mitra pelatihan cenderung tidak berbasis kebutuhan riil kelembagaan, melainkan lebih pada preferensi personal atau kelompok tertentu.

Dari sisi output, kegiatan peningkatan kapasitas belum menunjukkan dampak yang signifikan terhadap kemampuan legislatif anggota DPRD, baik dalam hal legislasi, pengawasan, maupun penganggaran. Banyak pelatihan yang dilaksanakan tidak berkontribusi langsung pada peningkatan kinerja DPRD, karena tidak ditindaklanjuti dengan penerapan di lapangan atau pembinaan berkelanjutan (Astikapuri, 2024).

Hal ini menunjukkan bahwa program peningkatan kapasitas belum benar-benar dirancang untuk mendukung efektivitas kelembagaan, melainkan berisiko menjadi sarana pemenuhan kepentingan individual atau kelompok tertentu dalam lembaga legislatif. Oleh karena itu, berdasarkan teori Lane, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fasilitasi peningkatan kapasitas oleh Bagian Fasilitasi masih rentan terhadap dominasi kepentingan privat, yang melemahkan orientasi pelayanan publik secara menyeluruh. Perlu adanya reformulasi program pengembangan kapasitas berbasis kebutuhan institusional dan evaluasi berbasis kinerja agar fungsi peningkatan kapasitas benar-benar memberi dampak strategis dan akuntabel.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai kinerja kesekretariatan dewan, khususnya pada Bagian Fasilitasi dalam menunjang tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting yang menggambarkan kondisi aktual di lapangan. Kinerja Kesekretariatan Dewan Bagian Fasilitasi Fasilitasi Dalam Menunjang Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan masih belum mencapai tingkat optimal sebagaimana yang diharapkan. Hal ini terlihat dari beberapa indikator yang menunjukkan adanya ketidakefisienan dalam proses kerja, belum maksimalnya pencapaian target memfasilitasi, serta rendahnya responsivitas terhadap dinamika kerja legislatif daerah. Fungsi strategis bagian ini dalam mendukung kerja DPRD pada aspek legislasi, anggaran, dan pengawasan belum sepenuhnya dijalankan secara terpadu dan profesional.

Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Kinerja Kesekretariatan Dewan Bagian Fasilitasi Fasilitasi Dalam Menunjang Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi jumlah maupun kualitas, belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku dan terdokumentasi, lemahnya sistem komunikasi/koordinasi internal dan eksternal, keterbatasan anggaran yang tidak sebanding dengan beban tugas, serta budaya kerja yang belum sepenuhnya berorientasi pada hasil (performance-based).

REFERENCES

Adriaman, M. (2024). *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=Luf4EAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=METOD E+KUALITATIF+DESKRIPTIF+HUKUM&ots=UiQFVqGq8S&sig=c5GK5whVcNXeK1-USyUv_iQwo0U

- Andriani, I., Chairunnas, A., & Bustang, B. (2025). ANALISIS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 8(3), 755–760. <http://ejournal.kompetif.com/index.php/akuntansikompetif/article/view/2459>
- Anyang, Y., & Fathurrahman, R. (2024). Penguatan Kelembagaan DPRD Melalui Penyediaan Tim Ahli/Tim Pakar dan Tenaga Ahli dalam Mendukung Tugas dan Fungsi DPRD. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 4(5). <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=27472000&AN=180180820&h=rffjzzNSTQBcysuSnXKK%2B6Mxg4Fja5LpvPLZ62i vJsQ62XK5SpUe00N3BUSbhTrbVa%2FSLFHsILNH4f52pbz1Ww%3D%3D&crl=c>
- Astikapuri, H. (2024). *PEMANFAATAN ARSIP LEGISLASI DIGITAL DALAM PELAYANAN INFORMASI PADA WEBSITE ARSIP DPR DI SETJEN DPR RI TAHUN 2023* [PhD Thesis, Universitas Nasional]. <http://repository.unas.ac.id/9846/>
- Gustaman, R. F., Darmawan, A. W., Gandi, A., Wijayanti, A., Nurlaela, N., Idin, A., & Wahidin, W. (2024). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bayfa Cendekia Indonesia. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=mto6EQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=METO DE+KUALITATIF+DESKRIPTIF&ots=5vCQtNJPBX&sig=LFAHKGaLen0Pv4frWFNlhrtqFVI>
- Hidayati, N. F., & Harini, S. M. (2024). REPRESENTASI PEREMPUAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2023. *JPIP: Jurnal Paradigma Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 12–26. <https://jpip.ulm.ac.id/index.php/jpip/article/view/17>
- Hildawati, H., Erlianti, D., Afrizal, D., Hendrayady, A., Riwayati, A., Widyawati, W., Iskandar, A., Judijanto, L., Mutmainnah, M., & Hijeriah, E. M. (2024). *Sistem Administrasi Negara: Teori dan Praktik*. PT. Green Pustaka Indonesia. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=Qn30EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=TEORI +LANE+ADMINISTRASI+PUBLIK+DPR&ots=G2dhhHB4zT&sig=0T0slp-zKLvJ1wQLxJdBsDfynoQ>
- Kelana, R. W., Mandini, D. D. S., Umar, M., & Bukhari, A. S. (2024). KEDUDUKAN DAN PERAN SEKRETARIAT DPRD DALAM MEMBANTU PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2021. *Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik*, 2(1). <https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/kybernology/article/view/89>
- Kewo, C. L. (2024). *Manajemen Kinerja Akuntansi Sektor Publik, Teori dan Aplikasi*. CV. Azka Pustaka. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=OGAHEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA8&dq=TEORI +LANE+ADMINISTRASI+PUBLIK+DPR&ots=6g3C1HI-ph&sig=6JFTsa_atAySWYJ8WGBIVd6W3KY
- Leylana, N., & Sarjito, A. (2024). Dampak pemekaran daerah terhadap pertahanan negara: Studi undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 4(1), 29–45. <https://ejournal.ipdn.ac.id/jtpm/article/view/4043>
- Muhammad, F. (2022). *Implikasi Praktek Gaya Kepemimpinan Situasional Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau* [PhD Thesis, Universitas Islam Riau]. <https://repository.uir.ac.id/16916/>
- Putri, A. H., & Endeng, E. (2025). Analisis Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Sistem Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(2), 1918–1924. <https://ulilalbabainstitute.co.id/index.php/J-CEKI/article/view/7149>
- Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian teoritis tentang teknik analisis data dalam penelitian kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1(2), 77–84. <https://pub.nuris.ac.id/journal/jomaa/article/view/93>
- RAMADHAN, M. Z. (2024). *IMPLEMENTASI CORE VALUES ASN (BERAKHLAK) DAN EMPLOYER BRANDING ASN (BANGGA MELAYANI BANGSA) TERHADAP KINERJA PEGAWAI ASN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN* [PhD Thesis, STIE INDONESIA BANJARMASIN]. <http://eprints.stiei-kayutangi-bjm.ac.id/2288/>
- Rohmah, I. Y., Judijanto, L., Ariesmansyah, A., Syarifuddin, S., Irawatie, A., Ikhwannudin, I., Hendrayady, A., Indrianie, M., Sa'dianoor, S., & Syahrial, S. (2025a). *Pengantar Administrasi Publik*. PT. Sonpedia

- Publishing Indonesia.
<https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=FLVDEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA172&dq=TEORI+LANE+ADMINISTRASI+PUBLIK&ots=GtrOTFdxen&sig=2ZOnaUWkGP94Nbcc5ufKjSvom1o>
- Rohmah, I. Y., Judijanto, L., Ariesmansyah, A., Syarifuddin, S., Irawatie, A., Ikhwannudin, I., Hendrayady, A., Indrianie, M., Sa'dianoor, S., & Syahrial, S. (2025b). *Pengantar Administrasi Publik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=FLVDEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA172&dq=fungsi-fungsi+khusus+menurut+Lane+PUBLIK&ots=GtrOTFcFdr&sig=-56M4lb_xv0dinLkOCeFbYMPs20
- SUBEJO, A. (2024). *ANALISIS PEMBUATAN PERATURAN DAERAH DAN PROSEDUR HUKUM ADMINISTRATIF PADA KANTOR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KOTA BARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN* [PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/38242>
- Suprpti Widasih, S. E. (2025). Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Konteks Administrasi Publik. *Governance dan Administrasi Publik: Teori, Dinamika dan Inovasi*, 32. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=Z3V0EQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA32&dq=TEORI+LANE+ADMINISTRASI+PUBLIK&ots=3AzY9urco-&sig=ShiQOgpvepsTY1TgCyJnYJLsj5I>
- Winduro, W. (2025). Responsivitas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo Dalam Menangani Keluhan Kerusakan Jalan Kabupaten Sukoharjo. *Solidaritas*, 9(1). <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/sldrts/article/view/12304>
- Wuryandanu, H. (2024). Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Penguatan Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 7(1), 217–229. <http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSH/article/view/2248>